

TATA KELOLA BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN

Gerry Purwanto

Dosen STISIP Yuppentek Tangerang

gerry.pwt@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya tata kelola distribusi bantuan logistik pada saat darurat melibatkan stakeholders. Menuntut adanya koordinasi dari berbagai unsur/elemen dalam mekanisme pendistribusian bantuan, yang ditetapkan pengelolaannya dan dilakukan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa semua bantuan dijaga hingga bantuan tersebut didistribusikan secara Cepat, tepat, Hemat, Selamat sesuai dengan sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan Tata Kelola dalam pendistribusian Logistik BPBD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tata kelola berdasarkan teori Efektivitas dalam Manajemen, metode yang digunakan adalah Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi, sumber data penelitian data primer dan sekunder. terdapat kendala jika Manajemen Logistik terkendala yang dapat menghambat mekanisme pendistribusian jika elemen/unsur tidak memahami mekanisme SOP yang ada. Fokus penelitian yaitu 1 Mekanisme pendistribusian logistik bagi korban bencana alam di Kota Tangerang Selatan, dengan menggambarkan Stakeholders yang terlibat dalam mekanisme pendistribusian logistik serta pendistribusian bantuan. 2) Mengidentifikasi penerapan mekanisme pendistribusian bantuan 3) Desain mekanisme yang lebih efektivitas dalam pendistribusian bantuan Logistik.

Kata Kunci : Tata Kelola, Logistik dan Manajemen Bencana

ABSTRACT

The importance of governance in the distribution of logistical assistance during emergencies involves stakeholders. Coordination of various elements/elements in the mechanism for distributing aid requires coordination. Besides, the establishment of appropriate management and monitoring is carried out to ensure that all assistance is maintained until the aid is distributed on target. The purpose of this study is to find Governance in the distribution of BPBD Logistics in South Tangerang City according to governance based on the theory of effectiveness in management, the method used is qualitative, data collection techniques data collection can be obtained from observations, interviews, documentation, and combination / triangulation. ,research data sources of primary and secondary data. There are obstacles if Logistics Management is constrained which can hinder the distribution mechanism if the elements / elements do not understand the existing SOP mechanism. The focus of the research is 1 Logistics distribution mechanism for victims of natural disasters in South Tangerang City, by describing the stakeholders involved in the logistics distribution mechanism and the distribution of aid. 2) Identifying the implementation of the aid distribution mechanism. 3) Designing a mechanism that is more effective in distributing logistics assistance.

Keywords: Governance, Logistic, Disaster management

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dialiri oleh sungai-sungai yang besar dan beraliran deras, curah hujan di Indonesia sebagai kawasan tropis dan tergolong tinggi, khususnya di musim penghujan, kondisi ini menimbulkan kerawanan untuk menimbulkan bahaya banjir. tidak dapat

disangkal, sejak dasa warsa terakhir terjadi degradasi lingkungan hidup diberbagai tempat di indonesi, hutan mengalami kerusakan, daerah aliran sungai mengalami kerusakan ekologi sehingga banjir terjadi di musim penghujan.

Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang berada di Wilayah Provinsi Banten yang rawan terjadi banjir pada musim penghujan setiap tahunnya, Seperti wilayah perumahan Pesona Serpong, Citra Prima Serpong, Bukit Pamulang Indah, Puri Bintaro Indah, Kampung Koceak Sengkol, Kampung Bulak, Lembah Pinus dan Jalan Raya Jombang

berdasarkan Observasi lapangan di Kecamatan Setu ditemukan informasi dari Ketua organisasi (Komunitas Siaga Bencana) yang fokus dengan kebencanaan di wilayah Pesona Serpong sebagai berikut : “Bencana banjir di perumahan Pesona serpong pada tanggal 26 April tahun 2019, diakibatkan curah hujan tinggi, intensitas air kiriman dari hulu bogor cukup besar setinggi 5,2 m dan terjadinya Sampah TPA Cipecaang longsor masuk ke Sungai pada tanggal 24 April 2019 yang menyebabkan aliran sungai tersumbat sehingga terjadi banjir ketinggian air 200-280 cm diwilayah pesona serpong dan keranggan”

Berdasarkan Informasi di atas, diketahui warga yang terendam 250 rumah dengan korban yang dievakuasi sebanyak 460 jiwa diungsikan ke salah satu tempat yang dijadikan lokasi pengungsian yang ditentukan oleh BPBD. Dalam mengatasi bencana Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Pasal 50 ayat (1) “ dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB”,sedangkan BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hurup c “yaitu pengerahan logistik”. selanjutnya, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Pasal 28 ayat (1): ”Mengenai pengerahan SDM, Peralatan dan Logistik sesuai dengan kebutuhan kelokasi bencana”, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeleluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Manajemen Bencana yang dilaksanakan BPBD mengacu Kepada Peraturan Kepala BNPB nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan Bantuan Logistik pada status Keadaan Darurat Bencana dalam implementasinya melibatkan unsur-unsur/elemen-elemen terkait Seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Organisasi masyarakat yang fokus dalam kebencanaan serta RT dan RW wilayah terdampak bencana, Dalam keadaan bencana BPBD menjadi Komando dalam distribusi bantuan dari pemerintah kota, provinsi, perusahaan atau organisasi maupun perorangan, dari mulai perencanaan, penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material alat-alat, jika manajemen Bencana tidak dijalankan dengan efektif maka BPBD sebagai komando dalam bencana tidak akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran apabila elemen-elemen seperti pemerintah kecamatan dan kelurahan memiliki persepsi yang berbeda mengenai kewenangan diwilayah kerjanya. sehingga seluruh komponen yang akan memberikan bantuan logistik kepada masyarakat terkena bencana tanpa mengikuti SOP yang ada yaitu harus lewat Pos/shelter yang telah ditentukan BPBD.

Semua struktur/elemen-elemen yang berperan memberikan dukungan terhadap BPBD dalam menjalankan tugasnya dimana fungsi logistik yang mendukung kebutuhan logistik baik untuk Tim Penanggulangan maupun untuk korban bencana, jenis logistik untuk penanggulangan seperti Peralatan atau material dan logistik untuk kebutuhan korban seperti selimut, makanan dan obat2 hanya sebagian yang mendapatkannya.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Tata kelola Distribusi Logistik yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 diwilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan harapan dapat memperoleh informasi yang lengkap dalam memaparkan tata kelola Distribusi logistik BPBD kepada korban bencana banjir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Teknik Pengumpulan Data pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triagulasi, sumber data penelitian data primer dan sekunder. wawancara mendalam kepada informan kunci adalah Unsur-unsur yang terlibat yang diambil peneliti sebanyak 4 orang meliputi 1 personil BPBD, 1 Aparatur Kecamatan, 1 Aparatur Kelurahan Kademangan serta 1 Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Kebencanaan.,

Fokus penelitian yaitu 1 Mekanisme pendistribusian logistik bagi korban bencana alam di Kota tangerang Selatan Kecamatan Setu, dengan menggambarkan Stakeholders yang terlibat dalam mekanisme pendistribusian logistik. Serta pendistribusian bantuan. 2) Mengidentifikasi penerapan mekanisme pendistribusian bantuan 3) Desain mekanisme yang lebih efektivitas dalam pendistribusian bantuan Logistik. lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang dianggap paling rentan bencana karena pemukiman berada di dekat sungai Cisadane. Waktu Penelitian April-September 2019.

Dalam Wawancara mendalam Peneliti menggunakan media digital serta melakukan pengambilan photo kegiatan dengan menggunakan Handpone, agar data yang diperoleh lengkap dan akurat maksudnya untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, peneliti melakukan wawancara BPBD bagian Logistik, Camat dan Lurah serta masyarakat, untuk mempertajam analisis peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat organisasi yang aktif dalam kebencanaan, yaitu komunitas siaga bencana dan Gema Lingkungan Cisadane (GEMALA) organisasi yang bergerak di wilayah Cisadane, dalam melakukan validasi data dilakukan diskusi dengan Ketua KSB dan Aktivis Lingkungan dari Gemala di bidang kebencanaan. dalam rangka memperoleh masukan bagi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, setelah mengadakan wawancara melakukan member check dengan BPBD sebagai Pelaksana Distribusi Logistik supaya terdapat kesepahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendistribusian Bantuan Logistik Yang Dilaksanakan BPBD Kota Tangerang Selatan.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidentil, tetapi harus dilakukan secara dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Manajemen Bencana Logistik tidak akan berhasil baik, jika tidak didukung oleh organisasi yang baik dan rapi, penanganan bencana akan kacau balau dan lamban tidak akan efektif, salah satu elemen penting dalam tata kelola bencana adalah penerapan organisasi dan tanggung jawab yang jelas. prosedur manajemen ini harus dipersiapkan dan ditetapkan, penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian, dilakukan oleh TRC dan organisasi yang telah dibentuk atau petugas-petugas lapangan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BPBD dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu “unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : koordinasi, Komando dan pelaksana penanggulangan daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli. selanjutnya, untuk dapat memaksimalkan Sumber Daya yang ada baik dari Unsur BPBD sendiri maupun Sumber Daya tiap tingkat organisasi baik ditingkat insident darurat maupun level Kecamatan dan Kelurahan, yang mencakup aspek taktis dan aspek strategis, berperan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dilapangan, memberikan arahan dan sekaligus memantau pelaksanaan manajemen bencana dilapangan.

BPBD bertugas monitoring langsung mengenai upaya penanggulangan sekaligus mengevaluasi permasalahan yang dihadapi TIM penanggulangan dan bagaimana mengatasinya serta distribusi Logistik. supaya dalam pelaksanaan Cepat, Tepat, Hemat dan Selamat dengan, melaksanakan seluruh SOP yang telah ditetapkan.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci penelitian Kepala BPBD secara garis besar berpendapat mengenai Pendistribusian Bantuan Logistik bahwa:

Pendistribusian bantuan logistik yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik diselenggarakan dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Setu dan Organisasi Kemasyarakatan (KSB,RT dan RW) sekitar yang terkena dampak banjir untuk memperlancar pendistribusian bantuan logistik kepada korban banjir tepat sasaran

hasil wawancara dengan Kasi Bidang Logistik mengatakan bahwa:

Distribusi logistik telah berdasarkan SOP yang ada”, namun perbedaan pendapat sebagian informan berpendapat bahwa BPBD dalam melaksanakan Tugasnya tidak semuanya dijalankan mengenai mekanisme yang ada, namun masih ada Distribusi Bantuan belum Tepat sasaran dan belum terpusat yang dikoordinir oleh BPBD, sehingga tidak tepat sasaran artinya yang seharusnya menerima masyarakat yang terkena bencana namun yang tidak terkena bencana mendapatkan logistik diakibatkan penyaluran distribusi tidak tepat sasaran.

Pada dasarnya Pendistribusian Bantuan Logistik yang di lakukan BPBD Kota Tangerang Selatan telah dilakukan berdasarkan ketentuan status keadaan darurat diatur oleh Peraturan Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan

Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana, Dimana Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan yaitu dengan membangun komunikasi dengan aparatatur Kecamatan Setu dan aparatatur kelurahan yang terkena dampak banjir yaitu Kelurahan Kademangan dan Keranggan, untuk melancarkan pendistribusian dan mengambil langkah-langkah yang baik sesuai dengan ketentuan pengelolaan Bantuan logistik seperti Tahap yang telah ditentukan dalam Ketentuan yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

Langkah awal yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dalam mendistribusikan bantuan logistik pada korban banjir di Kecamatan Setu yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Kecamatan Setu dan Kelurahan yang wilayahnya terkena banjir, kami menerima laporan terlebih dahulu, kemudian melakukan persiapan dengan melakukan kegiatan pemetaan wilayah oleh TRC ke wilayah terkena banjir dengan mengetahui jumlah korban yang terkena banjir. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan logistik yang ada dan jumlah personil yang harus dikerahkan untuk mendistribusikan logistik serta penentuan shelter logistik untuk didistribusikan kepada kepada masyarakat yang terdampak Banjir

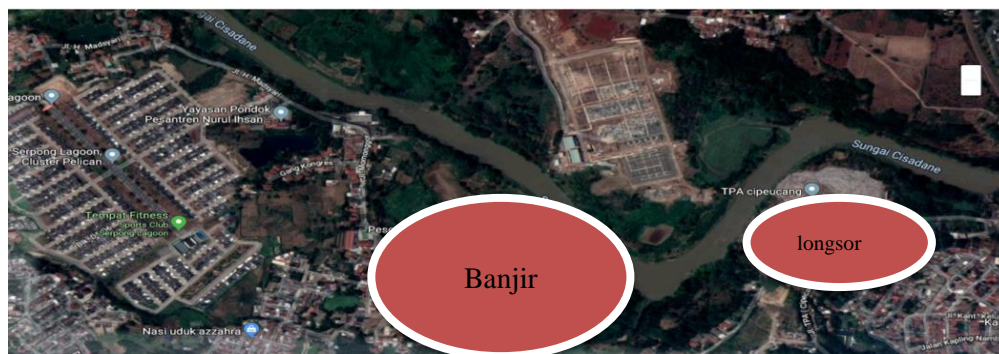
Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan informan berasal dari Aparatur Kecamatan Setu secara garis besar menyatakan bahwa:"

Kecamatan i memiliki tugas memfasilitasi dan berkoordinasi penanggulangan bencana yang ada di wilayah Kecamatan Setu sesuai ketentuan yang ada, terlebih dahulu kami memberikan suatu laporan awal kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai koordinator bencana, setelah menerima laporan dari pihak Kelurahan ataupun laporan langsung dari masyarakat yang terkena dampak banjir atau organisasi yang ada di wilayah kecamatan seperti UCT Kecamatan, Tagana, Karang Taruna, KNPI dan PMI, Komunitas Siaga Bencana yang membantu pihak kecamatan memberikan Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pendistribusian logistik bencana yang dilakukan BPBD melibatkan berbagai unsur yang ada di wilayah kerjanya, baik organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan, selain itu bahwa tanggung jawab pendistribusian Bantuan Logistik yang dilaksanakan BPBD berada di Bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam pelaksanaan Logistik bencana terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian logistik untuk penanggulangan dan logistik untuk korban bencana, seperti kebutuhan dasar manusia, untuk memperlancar tugasnya BPBD untuk berkoordinasi dengan wilayah bencana seperti Kecamatan Setu. Atas dasar berbagai potensi bencana yang telah disusun suatu skenario dari awal bencana yang dapat terjadi sehingga sejak awal dapat diketahui strategi penanganan bencana, sumber daya yang tersedia dan diperlukan dalam penangan bencana serta organisasi yang diperlukan, perencanaan awal membantu manajemen bencana yang cepat, tepat, hemat dan selamat sesuai bagi lingkungan atau daerahnya masing-masing..

Laporan awal yang didapatkan dari pemerintahan kecamatan Setu, yaitu laporan yang berkaitan area wilayah yang terkena banjir, Jumlah Korban yang terkena banjir serta merekomendasikan kepada BPBD shelter terdekat untuk logistik. Informasi dari pihak kecamatan menjadi acuan pihak BPBD Kota Tangerang Selatan bisa memprediksikan jumlah logistik yang harus didistribusikan dan jumlah personil yang harus dikerahkan dalam membantu pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mulai dari tahap persiapan, Tahapan perencanaan dan Organisasi, pelaksanaan serta pengendalian.

Adapun Peta Kecamatan terdampak banjir dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Tabel 1.1 Data Banjir di Kecamatan Setu Tangerang Selatan Tahun 2019

KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETINGGIAN AIR	PENYEBAB
Setu Kota Tangerang Selatan	Kademangan	Pesona Serpong	200-280 cm	Curah Hujan Tinggi + Penyumbatan Aliran Sungai
	Kranggan	Koceak	100-150m	Curah Hujan Tinggi + Penyumbatan Aliran Sungai

Sumber : Berdasarkan Hasil Wawancara

Sesuai Tugas pokok dan fungsinya menurut Peraturan Walikota Tangerang selatan No 33 Tahun 2016 Camat dan lurah di Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang strategis, untuk berkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, Camat berserta para lurah yang ada dikecamatan setu meninjau lokasi dengan mengikutsertakan Lembaga kemasyarakatan. hal ini senada dengan tugas camat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan,tugas dan tata kerja Kecamatan Setu camat dalam menjalankan tugasnya dalam kebencanaan terdapat dalam Pasal 9

huruf f yaitu : “mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh perangkat kecamatan dan menugaskan Kepala seksi ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan tugasnya dalam Perwal dalam Pasal 17 angka j yaitu : *“mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana di kecamatan”*

bertitik tolak dari pemikiran dan landasan Bertitik tolak dari pemikiran dan landasan yang dikemukakan di atas, sangat disesalkan apabila ada Camat yang menganggap dirinya kurang berkepentingan atau merasa berkurang aktivitasnya dalam pendistribusian logistik ke masyarakat banjir di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil wawancara dengan unsur dari masyarakat yang dijadikan sebagai informan penelitian memberikan suatu pendapat terkait pendistribusian bantuan logistik kepada korban bencana banjir di Kecamatan Kecamatan Setu, yang secara garis besar menyebutkan bahwa: *“Kami sebagai masyarakat yang terkena musibah banjir melihat distribusi yang dilakukan BPBD, Kecamatan serta Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dengan membuat dapur umum yang berada di RT 02/RW 08 serta dinas terkait lainnya datang kewilayah dengan melaksanakan tugasnya dengan baik maupun membersihkan tempat-tempat umum yang rusak akibat banjir”*.

Penyaluran Logistik bencana yang dilakukan BPBD di fokuskan di Wilayah Perumahan Pesona Serpong RW Kelurahan Kademangan dengan membuat Dapur Umum yang ditentukan Tim Lapangan berada di RT 02/08 Pesona Serpong. BPBD mengirimkan Mobil Logistik untuk melayani masyarakat yang terkena bencana dalam memenuhi kebutuhan Dasar pangan dengan memberikan pelayanan logistik standby 24 jam dilokasi bencana selama 4 hari. namun, kenyataannya masih ada makanan yang diberikan perorangan atau organisasi tidak melalui Sherter yang telah ditentukan pemberian logistik dengan mengikutsertakan Organisasi Masyarakat yang fokus di kebencanaan seperti Tagana, KSB serta RT dan RW setempat, namun pemberian dilaksanakan secara langsung kerumah rumah untuk nasi bungkus, padahal di dalam SOP BPBD jelas disebutkan BPBD Sebagai Komando Bencana.

Hasil dari kerjasama dan koordinasi antar unsur yang terlibat dalam pendistribusian bantuan logistik pada Bencana Banjir di Kecamatan Setu antara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan melalui Bidang Kewagawatdaruratan dan Logistik dengan aparatur yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan dan masyarakat dapat membantu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang selatan dalam melakukan pemetaan untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut :

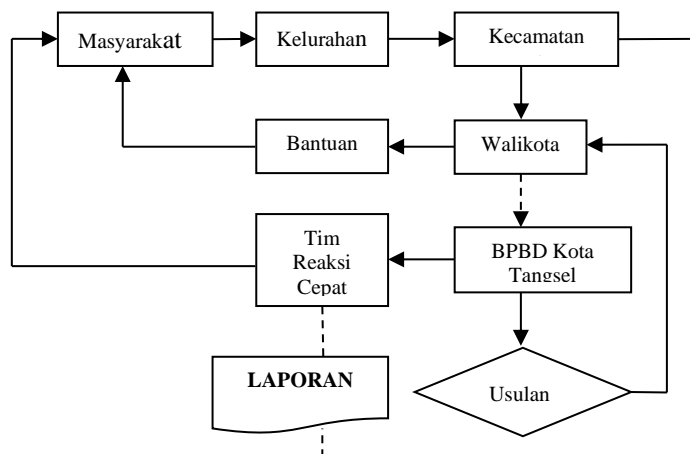
1. Diperolehnya data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang potensi sumber daya logistik, shelter dan jumlah personil untuk penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu
2. Diperolehnya acuan untuk penyampaian pemenuhan kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu

3. Membuat dan mengembangkan klaster logistik penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Membangun koordinasi dan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah kecamatan, kelurahan dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan untuk kesiapan dan ketersediaan logistik dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu
 - 2) Meningkatkan respon logistik pada status keadaan darurat di wilayah Kecamatan Setu terjadi banjir pada skala besar Seperti pada tanggal 26 April 2019.

2. Mekanisme Pendistribusian Bantuan Logistik

Mekanisme distribusi bantuan logistik bagi korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diketahui mekanisme distribusi dapat gambarkan dalam Tahapan proses di bawah ini.

Tabel 1.2 Alur Proses Mekanisme Pendistribusian Bantuan Logistik BPBD Kota Tangerang Selatan



Tahapan proses yang dilakukan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan hingga bantuan logistik diterima oleh korban bencana banjir ada 9 tahapan sebagai berikut :

1. Informasi datang dari organisasi kemasyarakatan RT dan RW serta Organisasi Kebencanaan KSB di wilayah bencana, kepada pemerintah kelurahan kademangan sebelum kejadian, melaporkan keadaan di wilayahnya.
2. Kepala Kelurahan melaporkan kejadian bencana banjir atas informasi dari masyarakat, kemudian melaporkan Camat Setu, Laporan tersebut selambat-lambatnya 1 jam setelah kejadian tersebut dan dapat dilakukan melalui telepon yang selanjutnya diikuti laporan tertulis.

3. Berdasarkan Laporan dari Kepala Kelurahan yang terkena bencana Camat Setu bersama MUSPIKA mengadakan peninjauan lokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah seperlunya.
4. Camat melaporkan Kronologis kejadian bencana banjir dan langkah-langkah yang telah diambil, serta saran dan usulan penanggulangan bencana kepada Walikota. Laporan tersebut dapat dilakukan melalui telepon yang selanjutnya diikuti laporan tertulis dengan tembusan kepada pelaksana BPBD.
5. Kepala BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) mendapat data kaji cepat dan langkah-langkah yang perlu diambil.
6. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Camat melaporkan permasalahan dan keadaan yang terjadi dilapangan kepada kepala BPBD untuk mendapatkan petunjuk/langkah-langkah strategis selanjutnya.
7. BPBD menindaklanjuti secara teknis dan Taktis, khusus pemberian Bantuan/santunan dari BPBD melalu Nota Dinas kepada Walikota.
8. Diajukan pencairan (bantuan /santunan) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
9. Selanjutnya bantuan tersebut di distribusikan Korban Bencana yang ada di Wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan bersama Unsur Kecamatan, Kelurahan dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan mengetahui mekanisme pendistribusian bantuan logistik di atas, masyarakat awam dapat mengetahui dan menggambarkan alur proses mekanisme yang dilaksanakan BPBD sesuai dengan SOP yang dimiliki, jika terjadi bencana dalam keadaan darurat, dari mulai laporan awal sampai dengan terjadinya distribusi logistik kepada masyarakat terkena bencana.

3. Penerapan Mekanisme Pendistribusian Bantuan Logistik

Dengan mengetahui tahapan proses mekanisme pendistribusian logistic yang melibatkan stakeholders dalam mendapatkan data dan informasi sehingga memiliki acuan pemenuhan kebutuhan logistik membuat dan mengembangkan shelter logistic, kemudian mengetahui mekanisme distribusi mulai dari masyarakat sampai dengan bantuan logistik datang kepada masyarakat. dalam bahasan ini mengetahui penerapan mekanisme pendistribusian logistik

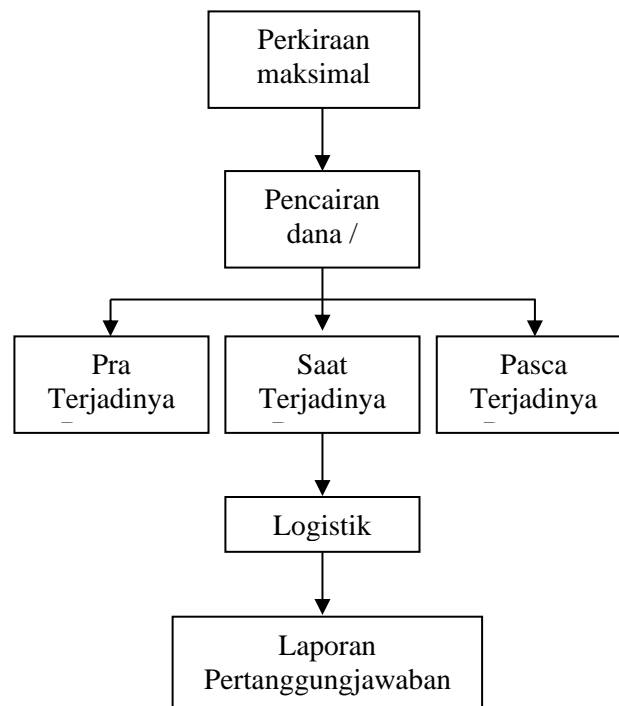
Berdasarkan hasil observasi bahwa bantuan logistik yang berasal dari pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, logistik yang didistribusikan berupa makanan pengganti beras yang mengandung karbohidrat. Logistik yang akan didistribusikan kepada masyarakat dicek terlebih dahulu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang pengecekan kelayakannya dengan memeriksa kondisi tanggal kadaluarsa logistik yang berupa makanan.

Berdasarkan Wawancara dengan warga “ Kami mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari yang melakukan distribusi BPBD dengan didampingi para RT/RW langsung ke Warga, kita merasa terbantu karena kita tidak sempat memasak karena 1 hari lampu padam dan tidak ada air bersih, kompor terendam jadi aktivitas kami bisa fokuskan kepada bersih2 rumah”

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan logistik mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana. Pada saat pra bencana bantuan yang diberikan berupa beras, gula dan minyak goreng, mie instan, obat-obatan dan minuman, pada saat terjadi bencana barang yang diberikan berupa kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat.

Pendistribusian bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang diberikan kepada Kecamatan Setu untuk selanjutnya barang tersebut didistribusikan oleh aparaturnya kecamatan yang dibantu oleh aparaturnya kelurahan dan unsur masyarakat. Penerapan mekanisme pendistribusian bantuan logistik apabila menggunakan Standar Prosedur (SOP) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

Desain Tata Kelola Mekanisme Dalam Pendistribusian Bantuan Logistik pada Bencana Banjir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan



Pendistribusian bantuan logistik tidak terlepas dari penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Ketika wilayah Kecamatan Setu, rutin setiap tahunnya menjadi langganan banjir, maka pengeluaran anggaran untuk pendistribusian bantuan logistik akan rutin dikeluarkan untuk korban banjir di wilayah Kecamatan Setu.

Berdasarkan pada perkiraan anggaran maksimal setiap tahunnya, pencairan dana untuk persiapan pengadaan stok logistik baik berupa makanan maupun non makanan berupa stok logistik dikeluarkan dan atau yang berupa anggaran dicairkan untuk persiapan dan pengadaan stok logistik sebelum terjadinya bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

Bantuan logistik yang didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang terkena banjir di wilayah Kecamatan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana dan paska terjadinya bencana. Distribusi bantuan logistik diwujudkan sebagai implementasi kesiapsiagaan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan bidang kebencanaan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, barang bantuan didistribusikan terlebih dahulu kepada wilayah yang terdampak banjir, akan tetapi bukan logistik yang bersifat barang konsumsi tetapi logistik yang didistribusikan bersifat non konsumsi seperti pakaian, tempat tidur berupa matras, tenda dan peralatan lainnya. Tujuannya adalah agar logistik yang didistribusikan apabila ditimbun dengan jangka waktu yang lama tidak berpengaruh terhadap ketidaklayakan penggunaan.

Pendistribusian bantuan yang lebih efektif membuat kebutuhan logistik korban bencana banjir terpenuhi lebih cepat. Selanjutnya barulah pelaporan dan rapat untuk dilakukan pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban anggaran dan penyaluran distribusi bantuan logistik pada bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Laporan pertanggungjawaban distribusi bantuan logistik dilaporkan dengan diadakan rapat guna membahas pertanggungjawaban dana dan penyaluran bantuan bencana alam. pertanggungjawaban tersebut diikuti dengan adanya dokumentasi, berita acara dan tanda terima baik dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pihak pemerintah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan maupun dengan unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pendistribusian bantuan logistik di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah membahas Tata Kelola Distribusi yang dilaksanakan Oleh BPBD Kota Tangerang Selatan, peneliti dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Diperolehnya data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang potensi sumber daya logistik, shelter dan jumlah personil untuk penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu, Diperolehnya acuan untuk penyampaian pemenuhan kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu, Membuat dan mengembangkan klaster logistik penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Membangun koordinasi dan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah kecamatan, kelurahan dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan untuk kesiapan dan ketersediaan logistik dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Setu
 - Meningkatkan respon logistik pada status keadaan darurat di wilayah Kecamatan Setu terjadi banjir pada skala besar
2. Tahapan proses yang dilakukan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan hingga bantuan logistik diterima oleh korban bencana banjir. Pemantauan yang terkoordinasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan logistik kepada korban banjir agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, serta barang yang diberikan sesuai dengan kebutuhan vital para korban pasca bencana.
 3. Logistik berupa makanan atau yang bersifat konsumsi harus dapat dikelola secara baik, agar tidak terjadinya penimbunan logistik terlalu lama yang dapat berpengaruh terhadap kelayakan makanan atau tidak kadaluarsa. Oleh karena itu dalam pengelolaan logistik yang bersifat barang konsumsi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang harus bisa bekerjasama dengan dunia usaha atau toko-toko yang menjual barang konsumsi atau toko sembako yang berada di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dengan payung hukum yang kuat sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku agar tidak terjadinya penyimpangan.

REKOMENDASI

1. BPBD Kota Tangerang Selatan melakukan Kerjasama dengan koperasi di wilayah yang terdampak banjir, sehingga apabila bencana banjir tersebut datang, barang dapat didistribusikan lebih cepat. Tentunya kerjasama tersebut harus memiliki payung hukum yang jelas, baik berupa Perda maupun Perbup dengan sanksi yang tegas apabila terdapat penyimpangan.
2. Sebaiknya dalam penyaluran bantuan / logistik, BPBD terjun langsung mengatur Logistik yang diberikan kepada masyarakat agar BPBD mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh pihak-pihak yang telah dipercayakan
3. Sebaiknya BPBD Kota Tangerang Selatan sebelum terjadinya bencana sudah melakukan pemetaan wilayah yang terkena banjir kemudian setelah teridentifikasi BPBD lebih memfokuskan kepada wilayah yang terkena banjir sehingga penanganan lebih maksimal.
4. BPBD sebaiknya melakukan pendataan terhadap warga yang terkena banjir kemudian dilanjutkan dengan melakukan upaya penanganan yang lebih komprehensif sehingga sasaran atau target yang dilakukan dapat tercapai dengan waktu yang jelas.

5. Perlu diadakan penelitian lanjutan dalam evaluasi bantuan logistik korban bencana banjir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
6. BPBD seharusnya menyimpan alat evakuasi di tempat rawan bencana, saat musim penghujan untuk mobilisasi evakuasi lebih cepat karena kondisi naik air di perumahan serpong akibat luapan cisadane terjadi begitu cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta. Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Hadi dan Sugiantoro, Ronny. 2010. *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Pasolong, Herhani. 2012. *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2015. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Reflika Aditama.
- Subagya MS. 2010. *Manajemen Logistik*. Jakarta. Haji Masagung.
- Sugiyanto dan Kadoatie. 2002. *Banjir, Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya dalam Prespektif Lingkungan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Peraturan dan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Setu.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan walikota tangerang selatan no 34 tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah